

MERAYAKAN KEBHINEKAAN DALAM KONTEKS KOTA AMBON

Ignasius S. S. Refo MA

Abstrak

Tulisan ini adalah usaha untuk menjawab kritikan bahwa damai di Kota Ambon baru pada level seremonial. Apakah faktanya memang demikian? Apakah bukan justru sebaliknya, kegiatan dan perayaan keagamaan, yang telah melibatkan begitu banyak orang dari komunitas agama yang berbeda telah menunjukkan betapa majunya kerukunan dan kedamaian di Kota Ambon dan Maluku? Dengan memanfaatkan studi literatur dan memperlihatkan apa yang terjadi di Kota Ambon, diperlihatkan bahwa kegiatan dan upacara keagamaan dapat menjadi sarana perjumpaan antar komunitas-komunitas yang berbeda agama.

Kata Kunci: Bhineka, Prasangka, Stereotip, Jarak Sosial, Konflik

1. Pendahuluan

Pesparani Katolik pertama telah berakhir. Warga Kota Ambon antusias menyambut dan lewat berbagai cara mensukseskan kegiatan tersebut. Tampak dengan jelas, bila kegiatan berskala nasional ini bukan semata menjadi milik orang Katolik, tetapi seluruh warga Kota Ambon, apapun agamanya. Hal yang sama pun telah terjadi pada beberapa waktu yang lalu, ketika Kota Ambon menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ dan Pesparawi. Tiga peristiwa berlangsung dengan baik, tanpa kendala yang berarti. Semua ini seolah memberi signal kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Kota Ambon, dan Maluku secara keseluruhan, telah aman dan damai. Seruan bahwa Maluku sebagai “laboratorium kerukunan” ternyata bukan hanya *lips service*, karena terbukti dari kian munculnya kesadaran masyarakat Kota Ambon tentang keragaman dan pentingnya menjaga kedamaian.

Meskipun demikian, ada kritik yang meminimalisir apa yang terjadi bahwa damai di Kota Ambon baru pada level seremonial. Apakah faktanya memang demikian? Apakah bukan justru sebaliknya, kegiatan dan perayaan keagamaan, yang telah melibatkan begitu banyak orang dari komunitas agama yang berbeda telah menunjukkan betapa majunya kerukunan dan kedamaian di Kota Ambon dan Maluku?

Tujuan dari tulisan ini adalah memperlihatkan bahwa kegiatan dan perayaan keagamaan dapat menjadi sarana untuk menyatukan kepelbagaian. Dalam arti ini pula visi dan kesadaran etika multikulturalisme menjadi sesuatu yang penting.

2. Kota Ambon yang multikultur

Sejarah lahirnya kota Ambon senantiasa dihubungkan dengan berdirinya benteng Portugis (1575) *Nossa Senhora de Annucida*,¹ yang dapat diterjemahkan sebagai “Bunda Kita dari Kabar Sukacita”. Sebutan “bunda kita” menunjuk pada Maria Ibu Yesus, sedangkan “kabar sukacita” menjelaskan peristiwa, yang tertulis di dalam Injil, dimana Bunda Maria menerima warta gembira dari Malaikat Gabriel bahwa diriNya akan mengandung Yesus Kristus (Luk 1, 26-38). Dalam tradisi Katolik, *Nossa Senhora de Annucida* adalah juga sebuah hari raya gerejawi, yang dirayakan pada setiap tanggal 25 Maret.

Untuk memahami alasan pemberian sebuah nama, apalagi nama itu berhubungan dengan orang-orang kudus, seperti Maria, kita perlu masuk dalam alam pikir orang-orang Portugis yang beragama Katolik. Dalam pandangan Katolik, adalah suatu kelaziman memberi nama orang kudus sebagai nama orang, benda atau kota. Bagi orang Katolik, orang-orang kudus adalah mereka yang ditetapkan oleh Gereja Katolik sebagai kudus, karena dianggap telah membaktikan hidup mereka dan bahkan sampai wafat bagi Tuhan. Meskipun telah masuk kemuliaan surgawi, orang-orang kudus ini dipandang tidak berpangku tangan saja, melainkan terus berdoa di hadapan Allah bagi Gereja dan umat beriman yang lemah selama peziarahan mereka di dunia.²

¹ (Nurhidayat SH, *Ambon Menengok ke Barat untuk Menjadi Pintu Timur*, Ambon: 2016, hlm. 5-6)

² Katekismus Gereja Katolik, hlm. 956.

Dengan pemberian nama tersebut, benteng Kota Ambon itu dipersembahkan kepada Maria dan karena benteng itu berhubungan dengan kota, maka dalam arti itu Kota Ambon pun sejak awal telah dipersembahkan dalam lindungan Maria. Sejak pemberian nama itu Katolik pun mulai mewarnai kehidupan kota Ambon sampai penyerahan Kota Ambon dari Portugis kepada VOC pada 23 Februari 1605, setelah Portugis kalah perang dari VOC yang dibantu pasukan Ternate, Luhu, Hitu, Jawa dan Goa. Benteng *Nossa Senhora* pun menjadi benteng Victoria. Selanjutnya, dengan prinsip *cuius regio eius religio*, dimana “agama pangeran menjadi agama negara dan semua penghuninya” yang umum berlaku di Eropa pada waktu itu, Kota Ambon pun berubah dari Kristen Katolik menjadi menjadi Kristen Protestan.

Bartels D., dalam *Di Bawah Naungan Nunusaku Jilid 2*, menjelaskan bahwa perpindahan dari Katolik ke Protestan terjadi pertama-tama atas inisiatif orang-orang Katolik pribumi, yang awalnya tidak menyadari perbedaan antara Katolik dan Protestan. Setelah perpindahan yang dramatis itu, barulah pemerintah kolonial kemudian memperlakukan semua desa Katolik sebagai Protestan.³ Kenyataan ini adalah sebuah konsekuensi logis dari larangan misi Katolik dan berakibat pada tidak adanya pelayanan dari para misionaris Katolik.

Islam telah ada di pulau Ambon, secara khusus di bagian Hitu, sebelum kehadiran Portugis di Ambon (sekurang-kurang abad XV) atas pengaruh Pangeran Jamilu dari Jailolo, pedagang Gujarat dan Persia, serta Patih Tuban dari Jawa.⁴ Fakta ini menunjukkan bahwa orang-orang Ambon sejak lama telah bersentuhan dengan agama-agama besar dan bahkan memeluk agama-agama tersebut. Ketika Kota Ambon kian bertumbuh sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan pendidikan, dinamika keagamaan terus bertumbuh seiring dengan perkembangan kota dan masyarakatnya. Ambon tidak tumbuh sebagai kota sekular, tetapi kota dengan denyut keagamaan. Banyak rumah-rumah ibadah berdiri megah dan hari-hari raya keagamaan sangat terasa mewarnai kota Ambon.

³ Bartels, D., *Di Bawah Naungan Nunusaku Muslim Islam Hidup Berdampingan di Maluku Tengah Jilid 2: Sejarah* (Jakarta Gramedia, 2017), hlm. 696.

⁴ *Ibid.* hlm. 533.

Kota Ambon masa kini kian tumbuh sebagai kota yang multikultur dari sisi agama. Setelah melewati masa 400-an tahun hidup dan berkarya di Kota Ambon, Kristen Protestan menjadi agama dengan pemeluk terbanyak, 50,54%. Selanjutnya, pemeluk Agama Islam, yang juga telah lama mendiami pulau dan Kota Ambon dengan 41,99%. Agama Kristen Katolik yang selama lebih dari 300 tahun hilang dari Kota Ambon, kembali dengan pemeluk 7,14%. Di samping agama-agama ini, terdapat pula pemeluk Agama Hindu (0,17%) dan pemeluk Agama Budha (0,16%).

Kota Ambon yang multikultur tidak hanya dari sisi agama, tetapi juga dari sisi keragaman etnis budaya yang sangat tinggi. Hampir orang-orang dari suku-suku yang ada di Maluku bermukim di Ambon. Ini ditandai dengan sebutan orang Orang Seram, Orang Buru, Orang Kei dan lain sebagainya. Selain itu, banyak pula orang-orang dari luar Maluku yang dikenal dengan Orang Buton, Orang Bugis, Orang Jawa dan lainnya. Bahkan, ada pula orang-orang dari luar Indonesia, seperti Orang Arab dan Orang Cina. Kesemua etnis ini telah ada di Kota Ambon sejak lama dan disparitas etnis tampak lewat penamaan yang telah disebut di atas. Akibat kekayaan etnisnya ini, Kota Ambon dengan sendirinya adalah multikultur, maka multikulturalitas Ambon adalah fakta yang terbantahkan.

3. Tantangan Masyarakat Multikultural

Sebagaimana dijelaskan, Kota Ambon telah menjadi kota yang multikultur. Namun, multikulturalitas ini tidak hanya merupakan berkat, karena ada keragaman kekayaan budaya dan potensi yang terkandung di dalamnya, tetapi multikulturalitas juga adalah tantangan. Disebut tantangan, karena multikulturalitas turut mengandung persoalan. Secara sosiologis, dua persoalan yang umum menggejala dalam kota dan masyarakat multikultur adalah prasangka dan konflik.

3.1. Prasangka

Gordon Alport dalam bukunya *The Nature of Prejudice* menjelaskan prangsaka atau *praejudicium* sebagai pernyataan atau kesimpulan tentang sesuatu berdasarkan perasaan atau pengalaman yang dangkal terhadap seseorang atau

sekelompok orang tertentu.⁵ Dalam perkembangannya, prasangka tidak lagi dimengerti sebagai pernyataan atau kesimpulan, tetapi lebih sebagai sikap. Baron dan Byrne dalam *Social Psychology. Understanding Human Interaction* menyatakan bahwa prasangka adalah suatu sikap negatif para anggota tertentu, yang semata-mata didasarkan keanggotaannya di suatu kelompok.⁶ Akhirnya, Jones dan Morris, dalam artikel mereka “Individual vs. Group Identification as a Factor in Intergroup Racial Conflict”, melihat prasangka adalah sikap antipati yang berdasarkan atas cara menggeneralisasi yang salah dan tidak fleksibel. Selain itu, prasangka juga merupakan sikap negatif yang diarahkan kepada seseorang atas dasar perbandingan dengan kelompok sendiri.⁷

Secara umum defenisi-defenisi ini menjelaskan prasangka sebagai sikap dengan implikasi sebagai berikut. *Pertama*, sikap adalah fungsi suatu skema untuk mengorganisasi, menginterpretasi dan mengambil informasi. Individu yang berprasangka terhadap kelompok-kelompok tertentu akan memproses informasi tentang kelompok-kelompok tersebut berbeda bila dibandingkan dengan memproses informasi kelompok lain. Kedua, prasangka sebagai suatu sikap melibatkan perasaan negatif kepada seseorang atau kelompok yang diprasangkai.

Sebagaimana dipahami prasangka itu masih berada pada *level* sikap dan bukan berada pada *level* tindakan. Dengan demikian, prasangka masih ada di dalam pikiran, karena jika telah mengarah pada tindakan, lebih-lebih jika dilakukan secara sistematis, maka itu disebut “diskriminasi”, yaitu tindakan menyingkirkan status dan peran individu atau sekelompok orang dari hubungan, pergaulan, serta komunikasi antar manusia.

Mengapa seseorang bisa menaruh prasangka terhadap orang atau kelompok lain? Baron dan Byrne menjelaskan: *pertama*, prasangka berakar pada persaingan di antara kelompok-kelompok sosial, karena memperebutkan

⁵ Alport, *The Nature of Prejudice*, (New York : Double Anchor Books, 1954)

⁶ Baron dan Byrne, *Social Psychology. Understanding Human Interaction* 9 ed. (Massachusetts: Allyn and Bacon, 1982)

⁷ Jones dan Morris, “Individual vs. Group Identification as a Factor in Intergroup Racial Conflict” dalam *Conflict Between People and Groups: Causes, Process and Resolutions*, editor: S. Worchel & J.A. Simpson (Chicago: Nelson-Hall Publishers, 1986).

komuditas atau kesempatan berharga; *kedua*, prasangka diperoleh melalui pengalaman langsung maupun melalui pengalaman orang lain dengan cara yang hampir sama dengan sikap-sikap lainnya; dan *ketiga*, prasangka terjadi karena seseorang memiliki kecenderungan untuk membagi dunia sosial menjadi dua kategori terpisah, yakni kelompok sendiri, “kita”, dan kelompok-kelompok lain, “mereka”.

Melanjutkan pendapat di atas, prasangka bersumber pada kesadaran bahwa: *pertama*, mereka adalah bukan kelompok lain yang berbeda latar belakang kebudayaan, serta keadaan mental-kesadaran: “kami” versus “mereka”; *kedua*, kelompok lain tidak mampu beradaptasi; *ketiga*, kelompok lain selalu terlibat dalam tindakan negatif (penganiayaan, kriminalitas dan sebagainya); dan *keempat*, kehadiran kelompok lain dapat mengancam stabilitas.

Selain itu Johnson menjelaskan bahwa prasangka dapat disebabkan oleh: 1) gambaran perbedaan antar kelompok; 2) nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh kelompok mayoritas sangat menguasai kelompok minoritas; 3) stereotip antar etnik; dan 4) kelompok etnik atau ras yang merasa superior, sehingga menjadikan etnik atau ras lain inferior.⁸

Adapun bentuk-bentuk prasangka secara garis besar bisa tampak dalam tiga hal, yakni stereotip, jarak sosial dan diskriminasi.

1). Stereotip

Kata stereotip berasal dari dua rangkaian kata Yunani, *stereos* yang berarti “solid” dan *typos*, yang berarti “model”. Dari asal katanya, stereotipe adalah suatu model yang solid atau sesuatu yang berbentuk tetap. Lebih lanjut, A.G. Johnson mengemukakan bahwa stereotip adalah keyakinan seseorang untuk menggeneralisasi sifat tertentu yang cenderung negatif tentang orang lain, karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman bersama.⁹ Dengan demikian, stereotipe adalah jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh

⁸ Jones dan Morris, “Individual vs. Group Identification as a Factor in Intergroup Racial Conflict” dalam *Conflict Between People and Groups: Causes, Process and Resolutions*, editor: S. Worchel & J.A. Simpson (Chicago: Nelson-Hall Publishers, 1986).

⁹ *Ibid.*

manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Stereotipe ini cenderung berupa prasangka negatif (meskipun ada pula prasangka positif), yang kadang-kadang dijadikan alasan untuk bertindak diskriminatif.

Stereotip memiliki tiga aspek esensial. *Pertama*, keberadaan individu dalam satu kelompok telah dikategorisasi. Kategorisasi itu selalu teridentifikasi dengan mudah melalui karakter atau sifat tertentu, misalnya: perilaku, kebiasaan bertindak, seks dan etnisitas. *Kedua*, stereotip bersumber dari bentuk atau sifat perilaku turun-temurun, sehingga seolah-olah melekat pada semua anggota kelompok. *Ketiga*, berdasar asumsi tersebut, individu yang merupakan anggota kelompok diasumsikan memiliki karakteristik, ciri khas dan kebiasaan bertindak yang sama dengan kelompok yang digeneralisasi itu.

2) Jarak sosial

Jarak sosial merupakan aspek lain dari prasangka sosial yang menunjukkan tingkat penerimaan seseorang terhadap orang lain dalam hubungan yang terjadi di antara mereka. Jarak sosial merupakan perasaan untuk memisahkan seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan tingkat penerimaan. Secara teoretis Emory Bogardus mengukur jarak sosial dengan menakar penerimaan seseorang terhadap orang lain dalam unsur: a) Kesiediaan untuk menikah dengan orang lain; b) bergaul rapat sebagai kawan; c) penerimaan sebagai tetangga; d) penerimaan sebagai rekan seprofesi/ jabatan; e) penerimaan sebagai warga negara; dan f) penerimaan sebagai pengujung negara.¹⁰

3) Diskriminasi

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa diskriminasi adalah satu bentuk prasangka yang telah diwujudkan dalam tindakan nyata. Tindakan diskriminasi biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki sikap prasangka sangat kuat akibat tekanan tertentu, misalnya tekanan budaya, adat-istiadat, kebiasaan atau hukum.

¹⁰ Doob, *Intercultural Communication* (New York: Word Publishing, 1995).

Prasangka dan diskriminasi merupakan *the vicious cycle* (lingkaran setan). Keduanya saling menguatkan: di mana ada prasangka, di sana akan ada diskriminasi. Konsep hubungan *conditioning* antara prasangka dan diskriminasi bukan karena individu rendah diri tetapi karena adanya *social inferiority*. Zastrow melihat bahwa diskriminasi merupakan faktor yang merusak kerjasama antar manusia dan komunikasi di antara mereka (Zastrow, 1989). Lebih jauh, Doob bahkan melihat diskriminasi menjadi perilaku yang ditujukan untuk mencegah atau membatasi satu kelompok lain yang berusaha memiliki atau mendapatkan sumber daya. Ia dapat dilakukan dengan mengurangi, memusnahkan, menaklukkan, atau mengasimilasi kelompok lain. Ini berarti, sikap diskriminasi tidak lain adalah satu kompleks berpikir.¹¹

3.2. Konflik

Alo Liliweri, dalam *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* menjelaskan bahwa konflik adalah: *pertama*, bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan; dan *kedua*, hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran tertentu, tetapi diliputi pemikiran, perasaan atau perbuatan yang tidak sejalan.¹²

Berdasarkan definisi tersebut, Liliweri menjelaskan bahwa dalam setiap konflik terkandung unsur-unsur sebagai berikut: a) ada interaksi antara dua pihak atau lebih yang terlibat; b) ada tujuan yang dijadikan sasaran konflik dan tujuan inilah yang menjadi sumber konflik; c) ada perbedaan pikiran, perasaan, tindakan di antara pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan; dan d) ada situasi konflik antara para pihak yang bertentangan.¹³

Konflik tidak akan mungkin terjadi, jika manusia hidup seorang diri saja. Karena itu, multikulturalitas senantiasa mengandung potensi konflik. Dalam konteks ini, mereka membedakan antara kemajemukan horizontal dan ada kemajemukan

¹¹ *Ibid*

¹² Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 249-250.

¹³ *Ibid*, hlm. 249-250.

vertikal. Kemajemukan horizontal mencakup struktur masyarakat yang majemukan secara kultural, seperti kemajemukan suku, agama, ras, dan kemajemukan secara sosial, dalam arti perbendaan pekerjaan dan profesi. Adapun kemajemukan vertikal adalah kemajemukan masyarakat berdasarkan kekayaan, pendidikan dan kekuasaan.

Meskipun konflik secara positif meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok (*ingroup*) yang mengalami konflik dengan kelompok lain, tetapi secara umum konflik senantiasa berdampak destruktif, seperti:

1. Keretakan hubungan antara kelompok yang bertikai
2. Munculnya rasa dendam, benci dan saling curiga
3. Kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa
4. Penaklukan salah satu kelompok terhadap kelompok lain.

3.3. Prasangka dan konflik antar Komunitas di Kota Ambon

Dalam masyarakat Kota Ambon yang multikultural, perbedaan suku dan agama telah menjadi sebuah kenyataan dalam hidup sehari-hari. Dalam konteks multikultural ini, menurut Elizabeth M. Zulfa, setiap anggota masyarakat dilahirkan dan dididik dalam suasana *askriptif-primordial* kesukubangsaan. Dalam *askriptif* ini, perbedaan antara siapa “saya” dan siapa “kamu” atau siapa “kami” dan siapa “mereka” sangat jelas batas-batasnya, selalu diulang dan dipertegas, diproduksi dan direproduksi secara budaya. Dalam ruang lingkup kesukubangsaan itu stereotipe berkembang dan menjadi mantap dalam suatu kurun waktu yang tidak terbatas.¹⁴ Bukan hanya itu, jarak sosial dan diskriminasi sebagai bentuk-bentuk lain dari prasangka dapat terjadi dalam relasi sosial.

Dalam hubungan dengan konflik horisontal, banyak masyarakat Kota Ambon telah merasakan pengalaman-pengalaman traumatik, baik itu di masyarakat Kristen maupun di masyarakat Muslim. Konflik itu telah mencederai kepercayaan banyak warga masyarakat. Akibatnya, hubungan sosial dan hubungan antar agama sering diwarnai dengan stereotipe, jarak sosial, sikap yang diskriminatif dan kompetisi yang tidak sehat. Jika jarak antar kelompok beragama terus terjadi dan tersegregasi, prasangka dan konflik sangat mungkin akan terus terjadi. Dalam kondisi sedemikian,

¹⁴ Elizabeth, M.Z., ”Multi Etnisitas Indonesia dan Potensi Konflik di dalamnya”, dalam Musahadi HAM (ed) *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia: Dari Konflik Agama sampai Mediasi Peradilan*. Semarang: WMC IAIN Walisongo. 2007) hlm. xii.

padangan Alo Liliweri menjadi relevan bahwa menjelaskan bahwa salah-satu pemicu konflik antar agama adalah karena umat atau kelompok agama tertentu tidak dapat memahami secara benar tentang umat atau kelompok agama lain, yang memiliki latar belakang teologi yang berbeda, yang mana mempengaruhi cara berfikir, merasa dan bertindak yang berbeda pula. Karena ketidapkahaman itu pula, banyak di antara umat beragama yang tidak tahu bagaimana seharusnya hidup dalam masyarakat yang multikultur.¹⁵

4. Merawat Kota Ambon dengan Merayakan Kebhinekaan

Untuk dapat mengendalikan prasangka dan mengurangi potensi konflik dalam masyarakat multikultur, ada dua cara yang umum digunakan, sebagaimana dijelaskan oleh Sarwono dan Meinarno dalam buku *Psikologi Sosial*, yakni 1) meningkatkan intensitas kontak antar kelompok; dan 2) rekategorisasi, yakni melakukan perubahan batas antara *ingroup* dan *outgroup*, dimana tidak ada lagi “kami” dan “mereka”.

4.1. Kegiatan-perayaan keagamaan

Bagaimana meningkatkan intensitas kontak antar kelompok, sehingga merubah batas antara “kami” dan “mereka”? Jalan satu-satunya adalah perjumpaan atau interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan dinamis antara individu yang satu dengan individu yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Seacara sosiologis, syarat demi terciptanya interaksi sosial adalah kontak sosial dan komunikasi sosial. Kontak sosial adalah tahap pertama dari hubungan sosial dimana seorang berhubungan dengan orang lain dan kelompok lainnya. Tahap berikutnya adalah komunikasi sosial, yakni penyampaian informasi dan tafsir atas informasi tersebut oleh mereka yang terlibat dalam komunikasi.

Dalam dunia digital ini interaksi sosial dapat terjadi dalam banyak cara, bahkan tanpa adanya perjumpaan fisik. Namun demikian, interaksi yang terbaik selalu mengandaikan perjumpaan fisik dan personal. Karena itu, dapat dipahami bila Tim SNPK The Habibie Center, sebagaimana termuat dalam *Segregasi, Kekekrasan dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca Konflik di Ambon*, mengusulkan pula butir-butir

¹⁵ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, hlm. ix.

rekomendasi penyelesaian konflik Ambon dengan memperhatikan aspek perjumpaan antar masyarakat Kota Ambon multikultur: 1) memperbanyak ruang-ruang publik, selain Lapangan Merdeka, untuk interaksi/ komunikasi antar komunitas; dan 2) meningkatkan kerjasama antar komunitas agama dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan.¹⁶

Adalah mudah memahami kebutuhan masyarakat Kota Ambon akan ruang-ruang publik, dimana semua orang dapat memiliki akses yang mudah dengan orang lain. Dengan cara ini segregasi dan jarak sosial dapat terjembatani. Karena itu, kini di Kota Ambon telah muncul ruang-ruang publik baru dimana orang dapat bertemu. Selain ruang-ruang publik sebagai ruang interaksi, pelaksanaan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan juga memiliki nilai dalam meningkatkan interaksi, agar masyarakat yang multikultur dapat berjumpa.

Pada level Provinsi Maluku, kegiatan keagamaan berskala nasional, seperti MTQ, Perparawi dan Pesparani, telah dapat meningkatkan kerjasama banyak orang dari berbagai latar-belakang agama. Dalam arti ini, kegiatan keagamaan dapat menjadi kesempatan dan semacam “ruang tanpa sekat agama” bagi setiap orang yang terlibat. Bahkan dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan dapat menjadi tali pengikat keragaman.

Dalam konteks Kota Ambon, ada beberapa kegiatan dan perayaan keagamaan tahunan berskala besar yang telah maupun berpotensi untuk melibatkan berbagai komunitas agama antara lain.

1) *Christmas Carol*

Dalam rangka menyambut Natal, setiap tahun, Komunitas M-Tree, dalam kerjasama dengan Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) dan DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi Maluku menyelenggarakan selama dua hari pagelaran seni. Kegiatan ini selalu dilaksanakan di depan Gereja Maranatha dan di dekat Kantor Sinode GPM, yang menjadi simbol pusat Gereja Protestan Maluku.

Meskipun acara ini dalam rangka Natal, yang adalah peringatan kelahiran Yesus, kelompok-kelompok dari berbagai komunitas agama, baik itu mereka yang

¹⁶ Tim SNP-K-THC, *Segregasi, Kekerasan dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca Konflik di Ambon* (Jakarta: The Habibie Center, 2014), hlm. 165.

Islam maupun Hindu, selain Katolik, mempersembahkan aneka acara yang telah mereka persiapkan.

2) Jalan Salib Hidup

Pada hari Sabtu Suci menjelang Paskah, Orang Muda Katolik (OMK) Paroki Maria Bintang Laut mengadakan Jalan Salib untuk mengenangkan sengsara Yesus Kristus. Kegiatan yang semula hanya diisi anak-anak muda Katolik, kini telah berkembang menjadi Jalan Salib Oikumene, dimana terlibat banyak anak-anak muda dari Gereja Protestan Maluku (GPM) dan Gereja Kristen lainnya. Kegiatan berupa dramatisasi kisah penyaliban Yesus ini, juga selalu mendapat sambutan dari pihak Gereja-Gereja sepanjang rute perjalanan salib dimaksud.

3) Festival Samrah dan Festival Hadrat

Festival Samrah merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Harian Ambon Expres pada Bulan Ramadhan, sedangkan Festival Hadrat diprakarsai oleh Badan Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Maluku dengan mengambil momen Idul Adha. Kedua festival yang melibatkan berbagai sanggar/kelompok seni ini telah menjadi ajang apresiasi seni yang bernuansa islami yang diminati khusus di kalangan muda dan dinilai positif bagi masyarakat karena dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap perkembangan seni dan budaya Islam yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Festival Hadrat yang digelar dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1439 H, sekaligus memperingati HUT Proklamasi ke 73 tahun 2018, dimulai dari depan Masjid Alfatah Ambon melewati tugu Trikora, Perigi lima, Waihaong kembali ke pelataran Masjid Alfatah dan tercatat melibatkan 41 grup peserta yang berasal dari Pulau Ambon, Haruku, Saparua, dan Pulau Seram.

4.2. Visi dan Etika Multikulturalisme

Masih perlu ditanyakan di sini: apakah seorang pemeluk agama tertentu dapat merayakan kegiatan dan upacara dari agama lain? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Sebab, secara teologis, setiap penganut agama terikat pada akidah dan dogma agama masing-masing. Itu berarti pertanyaan ini tetap menyimpan persoalan, terutama bagi penganut formal agama. Akidah dan dogma adalah hal yang tak dapat ditawar demi alasan apapun bagi setiap pemeluk agama. Karena itu, akidah

dan dogma harus dihormati antar pemeluk agama. Jika akidah dan dogma adalah wacana internal sebuah agama, maka wacana atas pertanyaan itu merupakan diskusi yang berada di luar diskusi agama, karena jika dimasukkan dalam konteks agama, maka tidak semua agama dan bahkan tidak semua umat beragama memiliki pendapat yang sama. Dengan demikian, apa yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan tentang merayakan kebhinekaan adalah diskusi tentang multikulturalisme, secara khusus tentang visi dan kesadaran etika multikulturalisme.

Istilah multikulturalisme mengandung dua pengertian, yaitu *multi* yang berarti “plural” dan *kultural*, yang berarti “budaya”. Frase *-isme* dalam kata multikulturalisme berarti paham atau ideologi dan memiliki implikasi politis, sosial, ekonomi dan budaya. Dengan demikian, di dalam pengertian multikulturalisme, ada dua ciri utama yang harus dimunculkan: *pertama*, kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*); dan *kedua*, legitimasi atas keragaman budaya. Dengan demikian, multikulturalisme adalah sebuah paham yang menghendaki adanya pengakuan dan perlakuan yang sama terhadap berbagai keragaman budaya.

Parsudi Suparlan mengartikan multikulturalisme sebagai sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan.¹⁷ Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme bisa dikatakan sebagai gagasan bertukar pengetahuan dan keyakinan yang dilakukan melalui pertukaran kebudayaan atau perilaku budaya setiap hari. Ini berarti, daripada seseorang hidup dalam “tempurung” kebudayaannya sendiri, akan lebih baik kalau ia mempelajari kebudayaan orang lain. Melalui ideologi multikulturalisme, manusia diajak untuk menerima standar umum kebudayaan yang dapat membimbing kehidupan dalam sebuah masyarakat yang majemuk.

1) Visi Multikulturalisme

¹⁷ Parsudi Suparlan, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, dalam situs internet www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel, 2002. hlm. 1.

Sejalan dengan penjelasan di atas, multikulturalisme merupakan gagasan dekonstruksi atas kebudayaan tunggal. Multikulturalisme juga merepresentasikan kelompok ras berbeda-beda, yang digambarkan dapat hidup dalam relasi egalitarian dan berkeadilan. Karenanya, multikulturalisme menyediakan wadah untuk penampakan bagi *the others*. Kahadiran *the others* harus dipahami tanpa reduksi atau distorsi, sehingga *the others* bisa tampil dalam soliditas dan kebersamaan yang ideal. Dengan demikian visi multikulturalisme adalah meruntuhkan tembok besi masyarakat yang tertutup untuk kemudian menapaki kehidupan bermasyarakat yang terbuka, demokratis, egaliter dan berkeadilan. Karenanya, multikulturalisme hanya akan terwujud bila seorang atau kelompok tertentu memiliki sikap dan persepsi yang sesuai dengan realitas kehidupan secara menyeluruh. Dalam konteks ini memaksakan multikulturalisme secara buta sama saja mengingkari nilai asasi multikulturalisme itu sendiri. Menjadi masyarakat yang multikultur, sejatinya berarti bersedia berdampingan dengan masyarakat lain, termasuk yang menentang atau anti-multikulturalisme sekalipun.

2) Kesadaran Etika Multikulturalisme

Etika senantiasa dipahami sebagai filsafat moral, karena etika memiliki sikap dasar kritis terhadap norma-norma dan hak-kewajiban yang berlaku. Dengan kata lain, etika dapat mengantar orang untuk bersikap rasional, sadar dan kritis untuk membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan keyakinan dan kebebasannya, sehingga setiap orang dalam otonominya dapat mempertanggungjawabkan pendapat dan pilihan tindakannya.

Terkait soal kesadaran etika multikulturalisme, Charris Zubeir menyatakan bahwa ada dua agenda mendesak yang harus diselesaikan. *Pertama*, mendekonstruksi wacana-wacana dominan yang memproklamirkan ke-aku-annya di atas belantara keragaman dan perbedaan. *Kedua*, secara dewasa mempersiapkan komunitas sosial untuk menghadapi klaim kebenaran yang dicanangkan oleh penganut agama lain.¹⁸ Artinya, harus ada kesadaran untuk menghancurkan hegemoni dan mitos ke-esa-an kuasa identitas tertentu.

¹⁸ Charis Zubeir, "Membangun Kesadaran Etika Multikulturalisme di Indonesia" dalam *Jurnal Filsafat UGM*. Jilid 34, No. 2. 2003, hlm. 119.

Lebih lanjut, bagaimana sikap yang benar dalam kesadaran membangun etika multikulturalisme? Untuk menjawab pertanyaan, Charris Zubeir memulai dengan mengajukan konsep *The Other*. Di sini pertanyaan yang perlu untuk diajukan adalah apakah ada keberanian moral untuk membela “yang lain” dalam segala kelainannya? Sejarah manusia senantiasa diwarnai dengan penyingkiran atas “yang lain”. Dalam arti ini “yang lain” selalu berada di bawah “yang sama”, karena “yang sama” adalah entitas yang memuat realitas seragam yang dominan, seperti sesuku, senangsa, seideologi dan seagama. Sedangkan, “yang lain” itu adalah komunitas minoritas.¹⁹

Dengan demikian, membangun kesadaran etika multikulturalisme dapat terjadi dengan melepas praktik dominasi mayoritas terhadap minoritas dan keinginan berkuasa yang senantiasa mewarnai relasi-relasi beragama. Kesadaran ini hendaknya dipahami sebagai sebuah strategi untuk menuju “kepada keterbukaan bagi yang lain”. Keterbukaan ini harus menjadi arah untuk membangun suatu sikap, *ethos*, yang egaliter.

4.3. Merawat dengan merayakan

Kegiatan dan perayaan keagamaan sebagaimana tergambar di atas tentu saja terafiliasi dengan agama tertentu; artinya menjadi milik agama tertentu saja. Kegiatan atau perayaan itu, dapat saja dilaksanakan oleh penganut agama tertentu dan memberi makna bagi penganut agama tersebut. Namun, dengan memberi ruang kerjasama dan dengan semangat keterbukaan, kegiatan dan perayaan keagamaan itu dapat menjadi ruang perjumpaan dan komunikasi lintas iman, sehingga memberi makna secara luas melampaui penganutnya, menjadi sarana kerukunan dan sarana untuk menyadari multikulturalitas. Kegiatan keagamaan dapat menjadi sarana bagi setiap orang yang terlibat untuk menumbuhkan relasi sosial, budaya dan agama dengan sesamanya.

5. Kesimpulan

Jika ditarik kesimpulan dari kegiatan dan perayaan keagamaan yang terbuka kepada setiap komunitas, maka setiap kegiatan dan perayaan keagamaan dapat.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 119.

- 1) Meningkatkan keimanan bagi umat yang terhubung dan memiliki kegiatan dan perayaan itu.
- 2) Menumbuhkan toleransi dan saling hormat-menghormati antar pemeluk agama.
- 3) Menumbuhkan sikap ramah, kasih-sayang dan menjauhkan sikap bermusuhan.
- 4) Mewujudkan kerukunan antar umat beragama, sehingga terbina persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Menjadi kesempatan mereka yang tidak seagama untuk mengenal dan memahami agama lain

KEPUSTAKAAN

- Alport, G.W., 1954. *The Nature of Prejudice*, Double Anchor Books, New York.
- Baron dan Byrne, 1982. *Social Psychology. Understanding Human Interaction* 9 ed. Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Bartels, D., 2017. *Di Bawah Naungan Nunusaku Muslim Islam Hidup Berdampingan di Maluku Tengah Jilid 2: Sejarah*. Jakarta Gramedia, 2017.
- Deaux, K., dkk, 1985. *Social Psychology in the 80-s*, edisi IV, Books Cole Publishing Company, California.
- Doob, C., 1995. *Intercultural Communication*, Word Publishing, New York.
- Gundykunst, W.B., 1991. *Bridging Differences: Effective Intergroup Communication*, Sage Publication, London.
- Johnson, A.G., 1986. *Human Arrangements: an Introduction to Sociology*, Harcourt Brace Jovanovich Publishing, Sandiego..
- Jones, J.M., dan Morris, K.T., 1986. "Individual vs. Group Identification as a Factor in Intergroup Racial Conflict" dalam *Conflict Between People and Groups: Causes, Process and Resolutions*, editor: S. Worchel & J.A. Simpson, Nelson-Hall Publishers, Chicago.
- Konsili Vatikan II, 1998. *Lumen Gentium*, Jakarta, Dokpen KWI
- Liliweri, A., 2005. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, LKiS, Yogyakarta.
- M.Z. Elizabeth, 2007. "Multi Etnisitas Indonesia dan Potensi Konflik di dalamnya", dalam Musahadi HAM (ed) *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia: Dari Konflik Agama sampai Mediasi Peradilan*. Semarang: WMC IAIN Walisongo.
- Nelson, D.T., 2009. *Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination*. New York: Psychology Press.
- Nurhidayat SH., 2016. *Ambon Menengok ke Barat untuk Menjadi Pintu Timur*, Ambon
- Robbins, S.P., dan Timothy, A.J., 2010. *Organizational Behavior*, London: Prentice Hall.

- Sarwono, S.W., dan Meinarmo, E.A., (ed.) 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Setiadi, E. M., dan Kolip, U., 2011. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman, Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Suparlan, P., 2002 *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, dalam situs internet www.scripps.ohiou.edu/news/cmd/artikel
- Tim SNPK-THC, 2014. *Segregasi, Kekerasan dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca Konflik di Ambon*. Jakarta: The Habibie Center.
- Zubair, A.C., 2003 “Membangun Kesadaran Etika Multikulturalisme di Indonesia” dalam *Jurnal Filsafat UGM*. Jilid 34, No. 2.